



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN
KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2015**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
2015**

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Kata Pengantar	vi
Ringkasan Eksekutif	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
E. Kepegawaian	11

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu	12
B. Kebijakan dan Program	13
C. Sasaran Strategis	16
D. Perjanjian Kinerja	17
E. Anggaran	20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja	21
B. Akuntabilitas Keuangan	40

BAB IV PENUTUP

Penutup

47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran:

- Perjanjian Kinerja Dirjen PAUD dan Dikmas Tahun 2015-Dir Bindiktara.

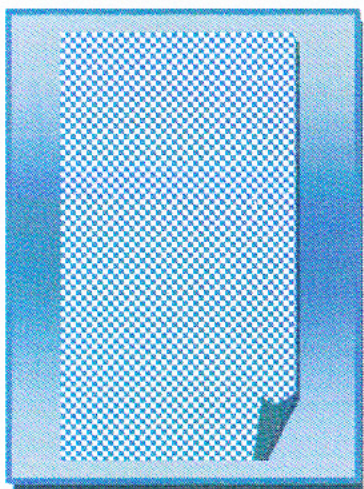
DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1	Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	16
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Dirjen Paud & Dikmas – Dir Bindiktara	19
Tabel 3	Alokasi Anggaran Direktorat Bindikakstara	20
Tabel 4	Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Bindiktara	22
Tabel 5	Data Kinerja, Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan	23
Tabel 6	Data Kinerja, Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	26
Tabel 7	Data Kinerja, Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar, Jumlah Siswa Paket A	27
Tabel 8	Data Kinerja, Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar, Jumlah Siswa Paket B	29
Tabel 9	Data Kinerja, Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Menengah Umum, Jumlah Siswa Paket C dan Vokasional	30
Tabel 10	Data Kinerja, Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Perempuan	32
Tabel 11	Data Kinerja, Jumlah PKBM dan Rumah Pintar Yang Dikelola Oleh Pemda Kab/Kota	33
Tabel 12	Data Kinerja, Jumlah Lembaga PNF Memperoleh Bantuan Penguatan Kelembagaan	34
Tabel 13	Data Kinerja, Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	35

Tabel 14	Data Kinerja, Jumlah Peralatan & Fasilitas Perkantoran	36
Tabel 15	Data Kinerja, Jumlah Kendaraan Operasional Kantor	37
Tabel 16	Data Kinerja, Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	38
Tabel 17	Data Kinerja, Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN	39
Tabel 18	Data Kinerja, Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI	40

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama GAMBAR	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Bindikakstara	10
Gambar 2	Kebijakan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	15
Gambar 3	Trend Penduduk Tuna Aksara Usia 15 – 59 Tahun 2010-2015	24
Gambar 4	Peta Sebaran Jumlah Penduduk Niraksara tahun 2015	25



PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamiin, atas bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015. LAKIP Tahunan ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan tugas yang meliputi tingkat keberhasilan dan hambatan-hambatan yang timbul untuk segera mencari pemecahannya.

Tahun 2015 merupakan tahapan tahun pertama dalam menapaki RPJM 2015 – 2019 yang merupakan rencana kerja jangka menengah Kabinet Kerja. Tahun 2015 sebagai tahun pembuktian kinerja Direktorat Bindiktara dalam memberikan berbagai layanan pendidikan bagi orang dewasa. Dengan adanya restrukturisasi organisasi, yang diikuti dengan rotasi pimpinan dan penataan pegawai secara keseluruhan, serta adanya banyak perubahan kebijakan yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Perubahan-perubahan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tentunya tidak semua dapat tergambarkan dalam LAKIP Tahun 2015 ini.

Dokumen LAKIP Direktorat Bindiktara Tahun 2015 tergambar pula pencapaian visi, misi, tujuan, dan target pelaksanaan kegiatan Direktorat Bindiktara selama satu tahun 2015. Pada tahun 2015 Direktorat Bindiktara melaksanakan 1 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja kunci.

Dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan LAKIP Direktorat Bindiktara Tahun 2015 ini kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan tugas kegiatan tahun-tahun kedepan.

Jakarta, 31 Desember 2015



Dr. Erman Syamsuddin
NIP 195703041988031015



RINGKASAN EKSEKUTIF

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memerintahkan setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara konsisten dan konsekuen setiap tahunnya. Dengan melakukan penyusunan LAKIP ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudnya *good governance*, dikatakan salah satu artinya dengan LAKIP saja tidak menjamin terciptanya *good governance*, paling tidak bagi instansi penyusun dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan/penyelenggaraan dan meningkatkan kinerjanya, dapat mendorong peningkatan kinerja baik di bidang administratif dan teknis. Di bidang administrasi, dengan tertib administrasi dapat mengetahui kekurangan dan/atau kendala dalam melaksanakan program/kegiatan sebagai substansinya.

LAKIP Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) disusun dengan maksud untuk mengetahui gambaran secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Target IKK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 tersebut di atas ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Bindiktara yang didalamnya meliputi satu sasaran strategis, yaitu: Fasilitasi, kompetensi penyelenggaraan/pendidikan dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global dengan 14 IKK yang harus dicapai selama kurun waktu satu tahun 2015.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, dialokasikan anggaran 386.559.940.000,- (tiga ratus delapan puluh enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu tanggal 31 Desember 2015 daya serap keuangan sebesar Rp. 360.205.843.699,- (tiga enam puluh milyar dua ratus lima juta delapan ratus empat puluh tiga Ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau dengan persentase sebesar 93,18%.

Sedangkan Sasaran strategis dengan 14 IKK, bila disandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, realisasinya sebagai berikut:

- lima capaian IKK melampaui target (di atas 100.0%),
- delapan sasaran strategis sesuai target (100.0%)
- Satu capaian IKK dibawah target (kurang dari 100.0%)

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat Bindiktara dan solusi yang diambil adalah:

- a. Himbauan Menteri Keuangan agar pemberian bantuan kepada masyarakat dengan menggunakan akun 52 atau belanja barang,
- b. Pada daerah 3T yang merupakan daerah prioritas, keterbatasan lembaga penyelenggara program, sehingga tidak mampu untuk mengakses kuota yang telah disediakan,
- c. Adanya kesulitan untuk melakukan MoU dengan lembaga penerima bantuan khususnya di daerah 3T, solusinya adalah melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.
- d. Kesulitan membentuk kelompok belajar pendidikan keaksaraan dengan jumlah warga belajar 10 orang, solusinya adalah membentuk kelompok belajar dengan warga belajar kurang dari 10 orang.
- e. Proposal daerah prioritas yaitu daerah 3 T dan daerah prioritas lainnya sangat kurang dan pada umumnya kurang layak, melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan daerah prioritas.



PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum

Upaya melawan ketidakterdidikan telah digaungkan oleh masyarakat secara swadaya bahkan sebelum Republik ini menyatakan kemerdekaannya. Hal ini terlihat dari pernyataan Ki Hadjar Dewantara di “Rapat Panitia Adat dan Tatanegara Dahulu”, “Sebenarnya dari pihak rakyat sendiri sudah sejak lama nampak usaha hendak memberantas buta huruf dikalangan rakyat ini”.

Program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mencerdaskan bangsa, pada awal kemerdekaan Indonesia terdapat sekitar 90% penduduk yang buta aksara. Sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, pada tahun 1946 Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan melalui Bagian Pendidikan Masyarakat menetapkan pemberantasan buta huruf sebagai salah satu prioritas program pendidikan melalui Kursus ABC.

Sejalan dengan perkembangan sejarah, pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan nomenklatur di lingkungan kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan masyarakat. Pada tahun 1949 Bagian Pendidikan Masyarakat berubah menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat yang salah satu tugas pokoknya adalah pemberantasan buta huruf dengan menyusun “Rencana Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf”. Hasilnya, penyandang buta huruf menjadi 40% pada tahun 1960. Pada tahun 1960, dikeluarkan “Komando Presiden” untuk menuntaskan buta huruf sampai tahun 1964, dan pada tanggal 31 Desember 1964 penduduk Indonesia usia 13 s.d. 45 tahun (kecuali Irian Barat) dinyatakan bebas buta huruf. (Dit, Dikmas, PBH di Indonesia, 1972)

Perubahan nomenklatur terakhir pada tahun 2014 dimana substansi pendidikan masyarakat tetap dipertahankan, dengan indikator Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud dan Dikmas) yang merupakan unit kerja eselon I dilingkungan Kemdikbud tetap eksis.

Berdasarkan Permendikbud No. 11 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di lingkungan Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas terdapat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional No. 1/U/2002, tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

LAKIP Tahun 2015 Direktorat Bindiktara disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran umum pelaksanaan penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi masyarakat berdasarkan indikator-indikator tujuan, sasaran atau target, efektivitas dan efisiensi daya serap anggaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan transparansi menuju *good governance* selama tahun 2015.

2. Tujuan

Penyusunan LAKIP Tahun 2015 Direktorat Bindiktara ini bertujuan untuk:

- a. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- b. Sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan untuk tahun yang akan datang.
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- d. Memberikan informasi yang tepat mengenai akuntabilitas kinerja Direktorat Bindiktara dalam merealisasikan penyediaan layanan pendidikan masyarakat kedalam komponen-komponen kegiatan.
- e. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan layanan pendidikan masyarakat agar semakin merata, bermutu dan akuntabel sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan.
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan sumber daya di bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi masyarakat sehingga kegiatan penyediaan layanan pendidikan masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel dan tepat guna.
- g. Melaksanakan analisis pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi masyarakat sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan maupun *output*, *outcome* dan *impact* bagi kehidupan masyarakat.

- h. Mempercepat terwujudnya *good governance* sebagai prasyarat pelaksanaan kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan dan pelayanan prima.
- i. Sebagai bahan pertimbangan untuk berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015, Pasal 305-324 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:

- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bindiktara yang dipimpin oleh seorang Direktur melaksanakan fungsi:
 - 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 3) peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
 - 4) fasilitas sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
 - 5) fasilitas pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;

- 6) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 7) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan; dan
- 9) pelaksanaan administrasi Direktorat;

Direktur Bindiktara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh empat pejabat eselon III dan sembilan pejabat eselon IV.

b. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Program dan Evaluasi:

- Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan menyusun bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan Direktorat;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
 - 2) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
 - 3) Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
 - 4) Penyusunan bahan dan fasilitas pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
 - 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat; dan
 - 6) Penyusunan laporan Direktorat.

c. Tugas Seksi Program:

Seksi Program, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran

Direktorat serta penyusunan bahan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

d. Tugas Seksi Evaluasi:

Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan serta penyusunan laporan Direktorat.

e. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca:

- Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan serta budaya baca;
 - 2) Penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca;
 - 3) Penyusunan bahan fasilitasi pelaksana penjaminan mutu di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan;
 - 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan serta sarana dan prasarana budaya baca;
 - 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan budaya baca; dan

- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan keaksaraan dan budaya baca.

f. Tugas Seksi Pendidikan Keaksaraan

Seksi Pendidikan Keaksaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan.

g. Tugas Seksi Budaya Baca

Seksi Budaya Baca mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang sarana dan prasarana budaya baca.

h. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan:

- Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
 - 2) penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;

- 3) penyusunan bahan fasilitasi pelaksana penjaminan mutu di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan; dan
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.

i. Tugas Seksi Pendidikan Kesetaraan:

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan.

j. Tugas Seksi Pendidikan Berkelanjutan:

Seksi Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan Berkelanjutan.

k. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan:

- Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata

kelola, dan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 2) penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 3) penyusunan bahan fasilitasi pelaksana penjaminan mutu tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; dan
 - 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

I. Tugas Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik:

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, evaluasi, dan laporan di bidang tata kelola dan peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

m. Tugas Seksi Kemitraan:

Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan pendidikan kesetaraan dan kesetaraan.

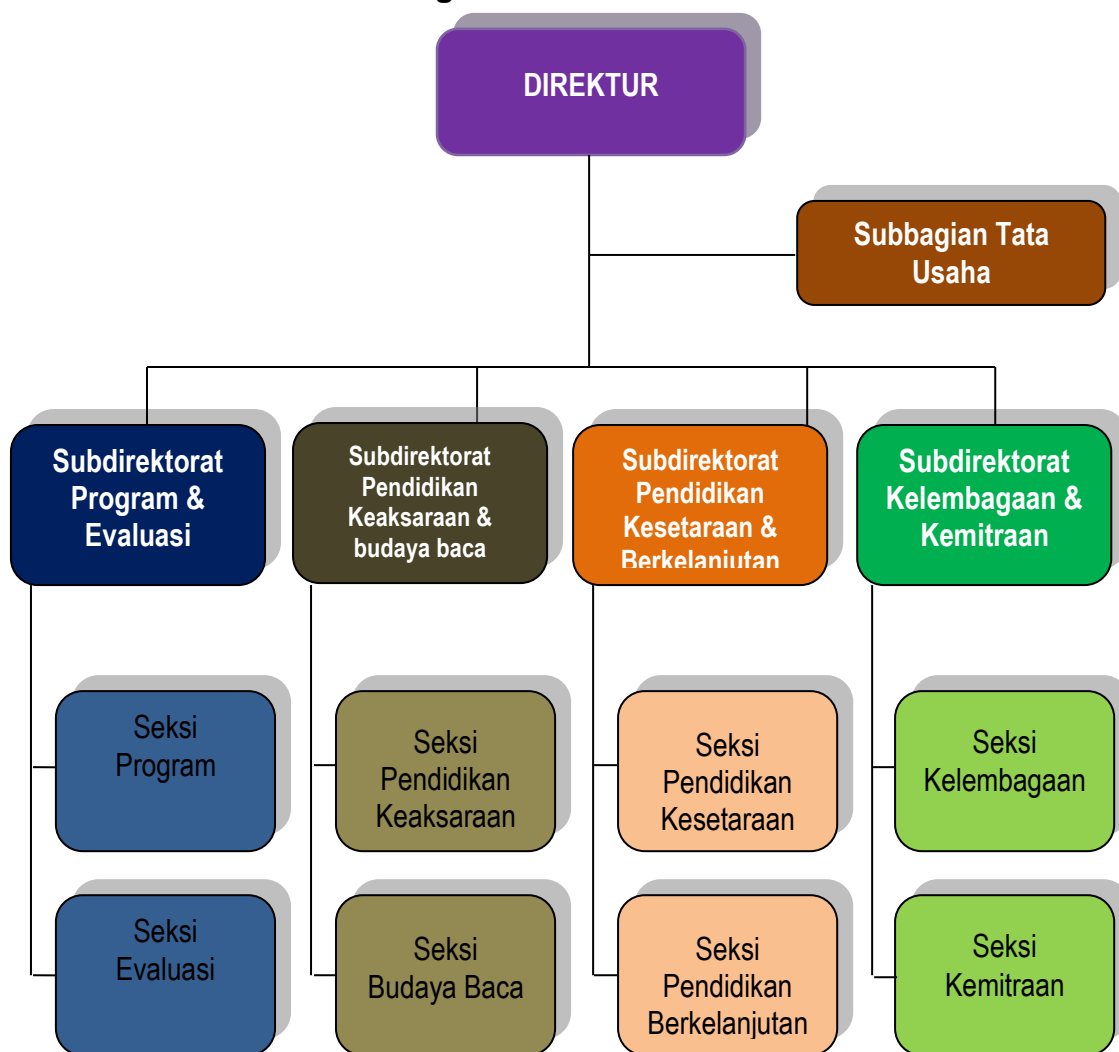
n. Tugas Subbagian Tata Usaha:

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan direktorat.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas maka, Struktur organisasi Direktorat Bindiktara dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Direktorat Bindiktara



E. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dit. Bindiktara didukung oleh pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Direktur	1 orang
2	Kepala Subdirektorat	4 orang
3	Kepala Seksi	8 orang
4.	Kepala Subbagian	1 orang
5.	Fungsional Umum	60 orang
	Jumlah	74 orang

2. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	3 orang
2	Strata 2	11 orang
3	Strata 1/Diploma IV	42 orang
4	SMA dan sederajat	18 orang
	Jumlah	74 orang

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	44 orang
2	Perempuan	30 orang
	Jumlah	74 orang



PERJANJIAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar lebih terarah Direktorat Bindiktara menetapkan visi, misi, dan kebijakan mutu yang diarahkan untuk mendukung mewujudkan cita-cita luhur pembangunan pendidikan nasional.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Direktorat Bindiktara sebagai salah satu unit teknis atasan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas Kemdikbud menetapkan visi, yaitu:

"Terbentuknya Pelaku Serta Ekosistem Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan Yang Berkarakter Dengan Dilandasi Semangat Gorong Royong"

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Bindiktara menetapkan misi sebagai berikut:

Penguatan pelaku pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, peningkatan mutu dan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik, melalui layanan:

- 1) Pendidikan keaksaraan,
- 2) Pengembangan budaya baca,
- 3) Pendidikan kesetaraan,
- 4) Pendidikan berkelanjutan (pendidikan pemberdayaan perempuan), dan
- 5) Peningkatan penataan kelembagaan dan kemitraan.

2. Kebijakan Mutu

Sejak tahun 2007, Direktorat Bindiktara (sebelumnya Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat) telah memperoleh ISO 9001:2008 dari UKAS Quality Management dengan Sertifikat No. 2878/A/0001/UK/En tanggal 14 Desember 2007, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang semakin baik. Sehubungan dengan itu, Direktorat Bindiktara menetapkan kebijakan mutu, yaitu:

Memberikan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang merata dan bermutu bagi peserta didik melalui kinerja Direktorat Bindiktara yang dibuktikan dengan:

- a. Dedikasi, yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan
- b. Inovasi, yang cerdas dalam mengembangkan program
- c. Komitmen, yang kuat untuk memberdayakan masyarakat
- d. Mutu, layanan yang prima dalam pengabdian terbaik
- e. Agenda, program dan kegiatan yang pasti dan bermakna
- f. Sinergitas, yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi program.

B. Kebijakan dan Program

1. Arah Kebijakan

Pendidikan nonformal merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah di wujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat, sehingga layanan pendidikan nonformal lebih diarahkan pada ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan dan berkesetaraan, bermutu, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan keaksaraan dikembangkan dalam rangka memberikan layanan pendidikan khususnya bagi penduduk tuna aksara, sejalan dengan kesepakatan Abuja tentang keaksaraan untuk pembangunan, program

keaksaraan mulai menekankan multikeaksaraan di samping keaksaraan fungsional dan kecakapan hidup. Mengingat sekitar 70% penduduk niraksara dewasa adalah perempuan dan sebagian dari mereka berusia di atas 45 tahun, maka pendidikan keaksaraan perlu diintegrasikan dengan program pendidikan pemberdayaan perempuan dan pengembangan budaya baca.

Untuk mencegah kekambuhan keniraksaraan penduduk dewasa sekaligus untuk meningkatkan budaya baca dengan slogan “Gerakan Indonesia Membaca”, maka program pendidikan keaksaraan di sinergikan dengan perluasan akses terhadap bahan-bahan bacaan. Layanan ketersediaan bahan bacaan ini diwujudkan dengan perluasan taman bacaan masyarakat (TBM) pada tingkat kecamatan dan desa, serta diperluas diruang publik seperti pasar, mall, rumah ibadah, rumah sakit dan panti sosial.

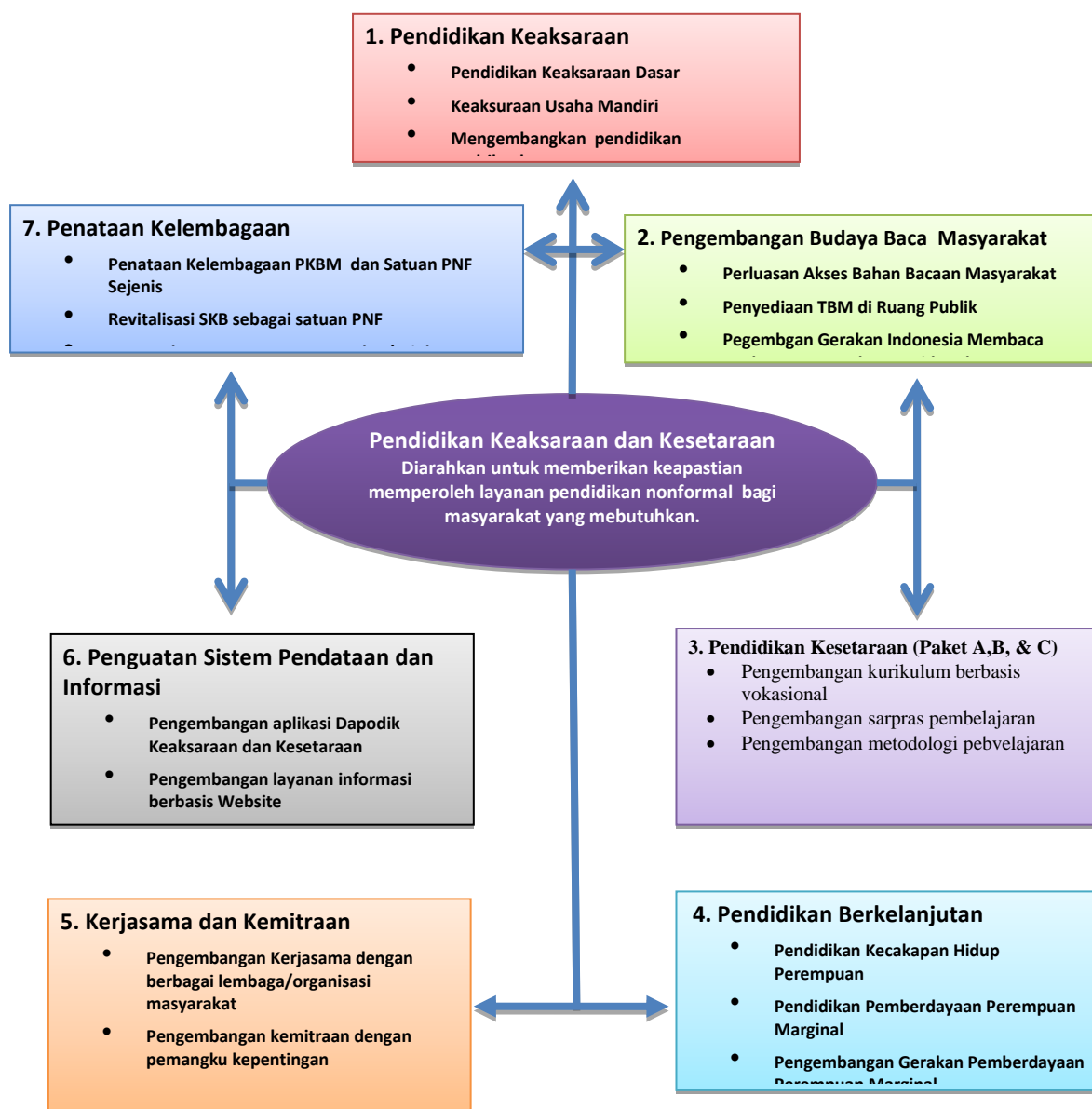
Sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2015 Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) dialihkan pengelolaan dan pembiayaannya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas, yaitu pada Direktorat Bidikakstara. Menyadari masih tingginya angka putus sekolah dan putus lanjut di tingkat SD sampai dengan SMA atau sederajat, maka program pendidikan kesetaraan perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan pendidikan saat ini, khususnya dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menuju wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.

Pendidikan berkelanjutan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup perempuan sebagai bagian terbesar dari sasaran Program Pendidikan Keaksaraan melalui pelatihan keterampilan praktis yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan beraksara dan berusaha mandiri dengan keterampilan bermata pencaharian. Melalui sinergi dan integrasi Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan berbagai Program Pendidikan Keterampilan, diharapkan akan terbangun investasi masyarakat pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat

untuk belajar sepanjang hayat yang menghasilkan penduduk berkarakter, beraksara, berbudaya baca, responsif gender, dan berakhlak mulia.

Oleh karena itu, arah kebijakan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dikembangkan secara terpadu melalui sinergi dan integrasi program yang saling mendukung seperti tergambar dalam Gambar dibawah ini:

Gambar 2
Kebijakan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan



C. Sasaran Strategis

Berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019, penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dengan sasaran program fasilitasi, kompetensi penyelenggara/ pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, sebagaimana Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Fasilitasi, kompetensi penyelenggara/ pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global	1. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	orang	150.525
	2. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A	orang	95.200
	3. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional.	orang	11.575
	4. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	orang	5.000
	5. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional	orang	25.200
	6. Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	orang	10.000
	7. Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota	lembaga	260
	8. Jumlah lembaga PNF memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	lembaga	445

	9. Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat.	naskah	62
	10. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	unit	39
	11. Kendaraan operasional perkantoran	unit	18
	12. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	dokumen	6
	13. Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	dokumen	20
	14. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	dokumen	1

D. Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019, diperlukan sebuah komitmen bersama seluruh pihak yang berada di dalam Unit Kerja yang sama. Direktur Bindiktara selaku pucuk pimpinan, memiliki tanggung jawab untuk mencapai target tersebut di atas. Bentuk tanggung jawab tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Paud dan Dikmas selaku atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja Tahun 2015, merupakan sebuah bentuk dokumen yang berisi tentang komitmen kesepakatan kerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat selaku pemberi amanah dengan Direktur Bindiktara selaku penerima amanah, dalam tugasnya untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemdikbud Tahun 2015 - 2019. Di dalamnya mencakupi sasaran strategis, indikator kinerja, target yang harus dicapai serta anggaran dari program-program yang disusun dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yakni dari Januari hingga Desember 2015. Dalam hal ini, Direktur Bindiktara berkomitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I.

Target yang harus di capai oleh Direktur Bindiktara, dijabarkan dalam sasaran strategis, yaitu “fasilitas kekasraan dan kesetaraan, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi kebijakan penyelenggaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global”.

Dalam upaya pencapaiannya, sasaran strategis tersebut diuraikan ke dalam 11 indikator kinerja utama. Indikator kinerja tersebut kemudian menjadi tolok ukur keberhasilan dari program-program yang dilaksanakan. Indikator kinerja yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja menunjuk pada target-target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan relevan pada kurun waktu tertentu (SMART). Penetapan indikator kinerja ini telah melalui proses identifikasi sesuai dengan kewenangan dan fungsi unit kerja, konsultasi sesuai dengan rencana strategis arah kebijakan umum, penilaian dan pemilihan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengelolaan keuangan dan kinerja, untuk kemudian ditetapkan sebagai sebuah indikator kinerja sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam sebuah akuntabilitas.

Untuk tahun 2015, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Paud dan Dikmas selaku pemberi amanah dengan Direktur Bindiktara selaku penerima amanah dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemdikbud 2015-2019 sebagaimana Tabel 2 tersebut di bawah ini:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja
Direktur Jenderal Paud dan Dikmas dan Direktur Bindiktara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.000)
Fasilitasi, kompetensi penyelenggara/ pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global	1. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	orang	150.525	76.404.076
	2. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A	orang	95.200	55.376.628
	3. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional.	orang	11.575	17.678.930
	4. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	orang	5.000	13.653.000
	5. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional	orang	25.200	78.730.139
	6. Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	orang	10.000	12.469.900
	7. Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota	lembaga	260	41.007.445
	8. Jumlah lembaga PNF memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	lembaga	445	26.700.000
	9. Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat.	naskah	62	8.152.595
	10. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	unit	39	575.000
	11. Kendaraan operasional perkantoran	unit	18	410.220

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.000)
	12. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	dokumen	6	3.816.970
	13. Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	dokumen	20	5.123.840
	14. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	dokumen	1	2.049.934

E. Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Bindiktara tahun 2015 dialokasikan dana pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas sebesar Rp 386.559.940.000,- (tiga ratus delapan puluh enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Alokasi Anggaran Direktorat Bindiktara Tahun 2015

NO.	JENIS BELANJA	NOMINAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
1.	Belanja Pegawai	4.559.056.000	1,18
2.	Belanja Barang*)	177.870.134.000	46,01
3.	Belanja Modal	1.250.000.000	0,32
4.	Belanja Sosial	202.880.750.000	52,49
	Jumlah	386.559.940.000,-	100,00



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab 2, bahwa pada tahun anggaran 2015 ini, Direktorat Bindiktara telah menetapkan satu sasaran strategis dengan 14 indikator kegiatan yang akan dicapai. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pencapaian ke 14 indikator kegiatan tersebut melalui pengukuran dari pencapaiannya didukung dengan output yang dihasilkan. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja Direktorat Bindiktara diukur melalui ketercapaian pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam penetapan kinerja dan target capaian yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil dengan baik jika pencapaian target $\geq 90\%$ dari yang ditetapkan diakhir tahun.

Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator kinerja sasaran, baik ketercapaian secara fisik maupun keuangan.

Kinerja Direktorat Bindiktara tahun 2015 dapat dilihat dari pencapaian target penetapan kinerja tahun 2015, menggambarkan pencapaian tujuan strategis dan tujuan organisasi. Pencapaian tersebut yang merupakan manifestasi dari realisasi pencapaian indikator kinerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan hambatan yang timbul dan dihadapi dalam melaksanakan komponen untuk mencapainya. Secara umum kinerja Direktorat Bindiktara sudah akuntabel, hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja pada output kegiatan pendukung pencapaian target sasaran strategis dengan indikator kinerja pada umumnya sudah dapat direalisasikan, baik secara fisik maupun secara keuangan sebagaimana terlihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp. 000,-)	REALISASI			
					FISIK	%	ANGGARAN (Rp.000)	%
Fasilitasi, kompetensi penyelenggara/ pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global	1. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	orang	150.525	76.404.076	150.525	100	72.481.125	94,87
	2. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A	orang	95.200	55.376.628	95.200	100	52.397.887	94,62
	3. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional.	orang	11.575 (3.140)	17.678.930 (28.521.614)	11.575	100	23.922.554	83,88
	4. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	orang	5.000 (652.213)	13.653.000 (9.825.460)	5.000	100	8.723.885	88,79
	5. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional	orang	25.200	78.730.139 (80.689.957)	25.200	100	75.739.132	93,86
	6. Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	orang	10.000	12.469.900	10.000	100	11.972.634	96,01

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp. 000,-)	REALISASI			
					FISIK	%	ANGGARAN (Rp.000)	%
	7. Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota	lembaga	260 (160)	41.007.445 (23.158.832)	160	100	17.182.966	74,20
	8. Jumlah lembaga PNF memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	lembaga	445 (470)	26.700.000 34.205.230	470	100	34.199.000	99,98
	9. Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat.	naskah	62 (20)	8.152.595	48	77,42	6.231.718	76,44
	10. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	unit	39 (1)	575.000	39	100	567.392	98,68
	11. Kendaraan operasional perkantoran	unit	18 (12)	410.220 (619.273)	12	100	561.938	90,74
	12. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	dokumen	6 (2)	3.816.970	6	100	2.454.239	63,30
	13. Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	dokumen	20 (4)	5.123.840 (5.127.440)	41	100	4.539.304	88,53
	14. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	dokumen	1	2.049.934 (2.205.085)	1	100	2.176.085	98,68

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari setiap indikator kinerja, berikut disampaikan ketercapaian indikator kinerja layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang diukur/dilihat dari ketercapaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1: **Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar**

Yang dimaksud usia dewasa disini adalah usia 15 – 59 tahun. Untuk melihat tingkat ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target dan realisasinya sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Data kinerja “Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	150.525	150.525	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2015 target **IKK** “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar” telah **dapat** dicapai 100%. Perealisasi IKK ini melalui BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar, yang sampai dengan akhir tahun 2015 ini telah dapat menyalurkan untuk pembelajaran sebanyak 150.525 orang. Dengan telah dibelajarkannya 150.525 orang tersebut maka jumlah penduduk buta aksara 5.984.075 orang atau 3,70% tahun 2014 berkurang menjadi 5.833.550 orang atau 3,61% tahun 2015 ini.

Keaksaraan Dasar merupakan upaya pemberian kemampuan keaksaraan bagi penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. Penduduk tuna aksara yang telah menyelesaikan pendidikan keaksaraan dasar tersebut mendapat Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

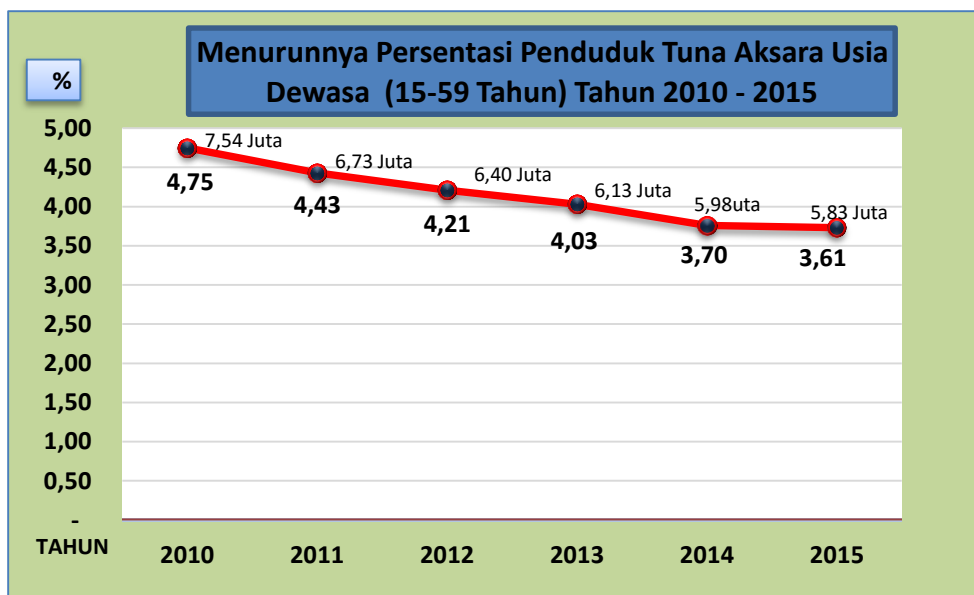
Capaian angka penurunan tuna aksara sebanyak 150.525 orang diperoleh melalui dukungan APBN. Apabila ditambah dengan dukungan APBD I maupun APBD II, angka niraksara penduduk dewasa tersebut diperkirakan lebih kecil.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung melalui strategi pelaksanaan *sistem block*, yaitu memberikan afirmasi bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Keaksaraan Dasar pada kabupaten yang merupakan kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan bimbingan secara intensif, seperti di Papua dan Papua Barat.

Berikut tren penduduk tuna aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun sampai dengan tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Gambar 3 di bawah ini.

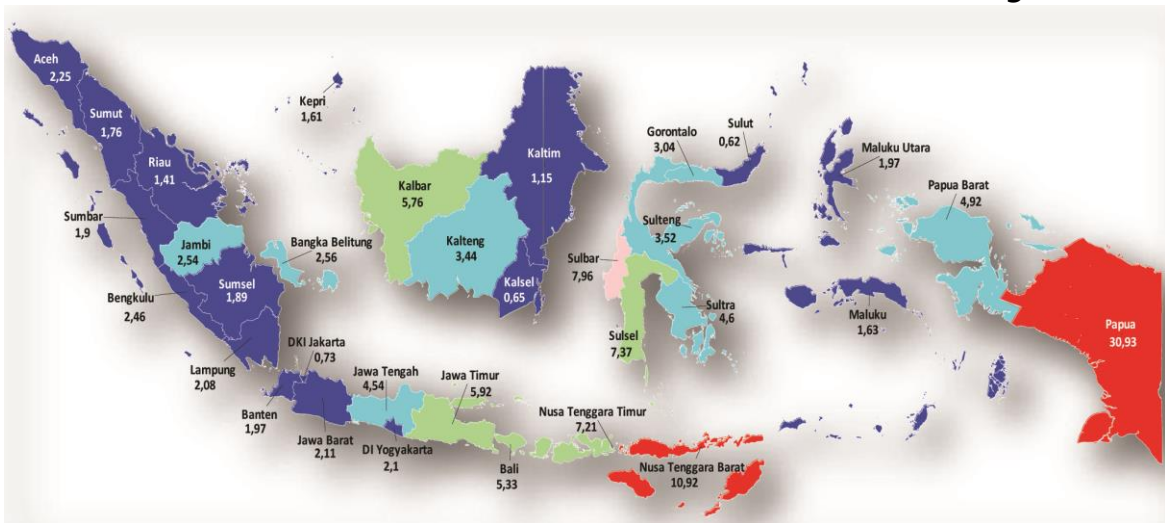
Gambar 3

Tren Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun 2010-2015



Sumber data: BPS dan Direktorat Bindiktara, 2015

Gambar 4
Peta Sebaran Jumlah Penduduk Niraksara tahun 2015



Sumber: BPS dan Kemdikbud, 2015

Usaha menurunkan penduduk tuna aksara, selama tahun 2015 menemui beberapa hambatan dan kendala, di antaranya adalah: (1) Adanya Surat Kementerian Keuangan No. S-848/MK.05/2014 tgl. 16 Desember 2014 tentang Penataan Akun Bantuan Sosial yang menyimpulkan bahwa bantuan sosial di Kemdikbud tidak tepat dan menghimbau agar menggunakan akun belanja barang. Hal ini mengakibatkan keraguan bagi pejabat perbendaharaan untuk menyalurkan dana bantuan sosial; (2) dampak dari kendala nomor (1) berpengaruh pada keterlambatan penyusunan petunjuk teknis; (3) lembaga tidak memiliki NPWP yang merupakan salah satu persyaratan administrasi dalam mengajukan proposal dan kesulitan mencarinya; dan (4) terdapat satu kabupaten (Kab. Asmat) yang mengalami kesulitan dalam komunikasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 tercapai adalah: (1) minta pengarahan dari pimpinan; (2) mempercepat penyelesaian Petunjuk teknis penyesuaian dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015; (3) untuk daerah 3T dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dinas pendidikan setempat, (4) mengalihkan kuota bagi kabupaten yang tidak bisa mengakses rencana akan dialihkan ketempat lain.

Indikator Kinerja 2 :

Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A

Ketercapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target dan realisasinya sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Data Kinerja “**Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Pra Paket A**”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A	95.200	95.200	100

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A” telah dapat dicapai 100%. Perealisasiannya didukung oleh 1 output kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) KUM, yang telah mampu merealisasikan bantuan KUM untuk membelajarkan 95.200 orang dari target 95.200 orang.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran dana bantuan KUM dengan sistem kuota untuk setiap provinsi dan dinas pendidikan provinsi membantu pelaksanaannya dengan melakukan sosialisasi, menerima dan menilai proposal, melakukan verifikasi lembaga, dan mengusulkan lembaga penerima bantuan KUM ke Direktorat Bindiktara.

KUM merupakan program penyelenggaraan peningkatan kemampuan keberaksaraan dan usaha produktif bagi peserta didik yang telah mengikuti

dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan. Prinsip dari pembelajaran KUM adalah meningkatkan kemampuan keberaksaraan dengan melatih berbagai keterampilan bermatapencarian.

Indikator Kinerja 3 :

Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional.

Ketercapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target dan realisasinya sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7

Data Kinerja “Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	11.575 (3.140)	11.575	368,63

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A” berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 sebanyak 3.140

orang, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 11.575 orang.

Selama tahun 2015, Sasaran dengan indikator kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional” berdasarkan target sasaran RKAKL telah **dapat** dicapai 100%. Dengan demikian maka apabila disandingkan dengan sasaran strategis berdasarkan renstra hasil yang dicapai sebesar 368,63%. Perealisasiannya didukung oleh 1 output kegiatan BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk membelajarkan 11.575 orang dari target 11.575 orang.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A dengan: 1) melakukan sosialisasi melalui UPT PP-Paudni dan BP-Paudni, 2) memilih dan memberdayakan SKB sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket A, dan 3) melakukan orientasi teknis sekaligus melakukan MoU.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A mengalami beberapa kendala seperti: 1) kurang maksimalnya UPT PP-Paudni dan BP-Paudni dalam merespon sosialisasi dari Dit. Binakstara, 2) ketidaksesuaian antara data warga belajar Paket A yang diminta dengan data yang diajukan dalam proposal, 3) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU.

Indikator Kinerja 4 :

Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional.

Ketercapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional” dapat dilihat melalui

pencapaian IKK dengan membandingkan target dan realisasinya sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8

Data Kinerja “Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	5.000 (652.213)	652.213	100

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional” berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 sebanyak 652.213 orang, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 5.000 orang.

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional” telah **dapat** dicapai 100%, yaitu melalui Direktorat Bindiktara sebanyak 5.000 oran, dan melalui dekonsentrasi di 34 provinsi sebanyak 647.213 orang. Perealisasiannya didukung oleh 1 output kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket B, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk membelajarkan 652.213 orang dari target 652.213 orang.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket B dengan: 1) melakukan sosialisasi melalui UPT PP-Paudni dan BP-Paudni, 2) memilih dan memberdayakan SKB sebagai

penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket B, dan 3) melakukan orientasi teknis sekaligus melakukan MoU.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket B mengalami beberapa kendala seperti: 1) kurang maksimalnya UPT PP-Paudni dan BP-Paudni dalam merespon sosialisasi dari Dit. Bindiktara, 2) ketidaksesuaian antara data warga belajar Paket B yang diminta dengan data yang diajukan dalam proposal, 3) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU.

Indikator Kinerja 5 :

Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional

Ketercapaian sasaran strategis Indikator Kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target dan realisasinya sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9

Data Kinerja “Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara pendidikan Menengah Umum (Paket C) dan Vokasional”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional	35.070 (25.200)	35.070	139,16

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional” berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 sebanyak 25.200

orang, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 35.070 orang.

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional” telah dapat dicapai 100%. Dengan demikian maka apabila disandingkan dengan sasaran strategis berdasarkan renstra hasil yang dicapai sebesar 139,16%. Perealisasiannya didukung oleh 1 output kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket C dan Vokasional, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk membelajarkan 35.070 orang dari target 35.070 orang.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket C dengan: 1) melakukan sosialisasi melalui UPT PP-Paudni dan BP-Paudni, 2) memilih dan memberdayakan SKB sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket C, dan 3) melakukan orientasi teknis sekaligus melakukan MoU.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket C mengalami beberapa kendala seperti: 1) kurang maksimalnya UPT PP-Paudni dan BP-Paudni dalam merespon sosialisasi dari Dit. Bindiktara, 2) ketidaksesuaian antara data warga belajar Paket C yang diminta dengan data yang diajukan dalam proposal, 3) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU.

Indikator Kinerja 6 :

Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan

Ketercapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran dan realisasinya, sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10

Data Kinerja **“Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan”**

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan	10.000	10.000	100

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan”** telah **dapat** dicapai 100%. Perealisasiannya didukung oleh 1 output kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk membelajarkan 10.000 orang dari target 10.000 orang.

Keberhasilan ini oleh karena sejak awal BOP Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini sudah masuk pada akun 57 sehingga dalam pelaksanaan penyalurannya memiliki waktu yang cukup, yaitu sejak bulan April 2015, disamping itu banyak lembaga yang peduli terhadap kecakapan perempuan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya proposal yang diterima di Direktorat Bindiktara.

Kecakapan Hidup Perempuan adalah pendidikan yang memberikan bekal dasar kecakapan sosial, personal, akademik, dan keterampilan kepada perempuan dewasa yang berkeaksaraan rendah.

Indikator Kinerja 7 : Jumlah PKBM Pembina dan Rumah Pintar Yang Dikelola Oleh Pemda Kab/Kota

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah PKBM Pembina dan Rumah Pintar Yang Dikelola Oleh Pemda Kab/Kota dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran dan realisasinya, sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11

Data Kinerja “**Jumlah PKBM Pembina dan Rumah Pintar Yang Dikelola Oleh Pemda Kab/Kota**”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah PKBM Pembina dan Rumah Pintar Yang Dikelola Oleh Pemda Kab/Kota	260 (160)	160	61,54

Terjadi perubahan target dari 260 lembaga menjadi 160 lembaga karena PKBM Pembina dan Rumah Pintar belum menjadi prioritas sebagaimana penguatan kelembagaan PNF. Sehingga pengurangan target disini memperbesar/menambah target penguatan kelembagaan PNF.

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “**Jumlah PKBM Pembina dan Rumah Pintar Yang Dikelola Oleh Pemda Kab/Kota**” telah **dapat** dicapai 100%. Namun demikian, bila disandingkan dengan Rencana Strategis maka target kinerja hanya mencapai 61,54%. Perealisasiannya didukung oleh 1 output kegiatan Bantuan PKBM Pembina dan Rumah Pintar Yang Dikelola Oleh Pemda Kab/Kota, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk mengelola PKBM dan Rumah Pintar 160 lembaga dari target 160 lembaga.

Keberhasilan ini oleh karena banyaknya proposal yang diterima oleh Direktorat Bindiktara sejak awal-awal tahun. Sehingga sangat membantu dalam penyaluran bantuan.

PKBM diselenggarakan bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan nonformal, sebagai penambah, pengganti, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian, mengembangkan diri untuk berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Untuk dapat memberikan layanan pendidikan nonformal dan informal, sebagaimana tersebut di atas, PKBM senantiasa ditingkatkan mutunya melalui permagangan bagi pengelolanya dengan memberikan bantuan. Melalui bantuan

ini diharapkan PKBM memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nomor induk lembaga (NILEM).

Indikator Kinerja 8: Jumlah lembaga PNF memperoleh bantuan penguatan kelembagaan

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah lembaga PNF memperoleh bantuan penguatan kelembagaan dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran dan realisasinya, sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Data Kinerja “Jumlah Lembaga PNF
Memperoleh Bantuan Penguatan Kelembagaan”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah lembaga PNF memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	445 (470)	470	105,61

Terjadi perubahan target dari 445 lembaga menjadi 470 lembaga karena masih banyak membutuhkan lembaga satuan PNF yang bermutu dalam rangka untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). untuk memenuhi kebutuhan dana karena adanya tambahan target dengan mengurangi target pada PKBM Pembina dan Rumah Pintar yang belum menjadi prioritas.

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah lembaga PNF memperoleh bantuan penguatan kelembagaan” telah **dapat** dicapai 100%. Dengan demikian, apabila disandingkan dengan Renstra maka target kinerja mencapai Perealisasiannya didukung oleh 1 output kegiatan Bantuan Penguatan kelembagaan PKBM, yang telah mampu merealisasikan

bantuan tersebut untuk meningkatkan mutu PKBM sebanyak 470 lembaga dari target 470 lembaga.

Indikator Kinerja 9:

Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran dan realisasinya, sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Data Kinerja “Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	62 (20)	48	240

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 dengan dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan” sebanyak 20 naskah, sedangkan berdasarkan RKAKL Direktorat Bindikakstara target sebanyak 62 naskah.

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan” hanya **dapat** mencapai 76,44%. Namun demikian, apabila disandingkan dengan target sasaran strategis Renstra, maka telah mampu merealisasikan 240%. Keberhasilan dalam merealisasikan target ini dengan memberdayakan para ahli dibidangnya sehingga mampu merealisasikan 48 naskah NSPK.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan menjamin kualitas pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dan seiring dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, terhadap layanan pendidikan nonformal khususnya layanan pendidikan keaksaraan, maka pada tahun 2015 ini perlu disusun NSPK yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam melaksanakan/menyelenggarakan program.

Indikator Kinerja 10: Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran dan realisasinya, sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Data Kinerja “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	39 (1)	39	100

Perlu diinformasikan bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” dengan target sebanyak 1 unit, tetapi berdasarkan RKAKL Direktorat Bindiktara target sasaran strategis sebanyak 39 unit. Ini maksudnya bahwa yang dimaksud 39 ini adalah 39 jenis barang. Sehingga 1 unit yang dimaksud dalam Renstra sama dengan 39 jenis barang di RKAKL.

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” telah **dapat** dicapai 100%, melalui pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebanyak 39 unit dari target 39 unit.

. Indikator Kinerja 11: Kendaraan Opreasional Perkantoran

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Kendaraan Opreasional Perkantoran” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran dan realisasinya, sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Data Kinerja “Kendaraan Operasional Kantor”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Kendaraan Opreasional Perkantoran	18 unit (12 bulan)	12 bulan	100

Terjadi perubahan target dari 18 unit menjadi 12 bulan dengan alasan penyesuaian dengan RKAKL. Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Kendaraan Opreasional Perkantoran” telah **dapat** dicapai 100%, melalui pelaksanaan perawatatan dan pemeliharaan terhadap kendaraan operasional kantor selama 12 bulan dari target 12 bulan.

. Indikator Kinerja 12: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” dapat dilihat melalui

pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran dan realisasinya, sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Data Kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	6 (2)	6	300

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 dengan target sebanyak 2 dokumen, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 6 dokumen.

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana telah **dapat** dicapai 100%. Dengan demikian, apabila disandingkan dengan Renstra maka pencapaian kinerja mencapai 300%. Perealisasinya melalui pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (1 dokumen), RKAKL (1 dokumen), program kerja (1 dokumen), dan Monitoring dan evaluasi (3 dokumen) atau enam dokumen dari enam dokumen yang ditargetkan.

Indikator Kinerja 13: Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran dan

realisasinya, sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Data Kinerja “Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN”

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN	20 (41)	41	100

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN” berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 dengan target sebanyak 4 dokumen, sedangkan target yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 20 dokumen.

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN” telah **dapat** dicapai 100%, Perealisasinya melalui berbagai pelaksanaan kegiatan seperti: review dokumen kebijakan mutu, sehingga mampu merealisasikan 20 dokumen dari 20 yang ditargetkan.

Indikator Kinerja 14: **Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apreasiasi**

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apreasiasi” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran dan realisasinya, sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja pada Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Data Kinerja “Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apreasiasi

Indikator Kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	
		Fisik	%
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apreasiasi	1	1	100

Selama tahun 2015, Sasaran strategis dengan indikator “Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apreasiasi telah **dapat** dicapai 100%, Perealisasinya melalui pelaksanaan kegiatan peringatan hari aksara internasional dengan melakukan berbagai lomba dan apresiasi oleh lembaga PNF dan tokoh, sehingga mampu merealisasikan 1 dokumen dari 1 dokumen yang ditargetkan..

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran Berdasarkan Kontrak Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Bindiktara dengan Direktur Jenderal Paud dan Dikmas, alokasi anggaran Direktorat Bindiktara yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis, yaitu sebanyak 14 IKK sebagai output kegiatan, sebesar **Rp.342.148.677.000,-** (tiga ratus empat puluh dua milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 14 indikator kinerja dimaksud adalah:

- a. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar
Alokasi anggaran sasaran strategis dengan Indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar sebesar Rp. 76.404.076.000 (tujuh puluh enam milyar empat ratus empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk membiaya satu output dengan realisasi sebesar Rp. 72.481.124.650,- dengan persentase capaian kinerja 94,87%.

- b. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A

Alokasi anggaran sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A sebesar Rp. 55.376.628.000,- (lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk membiayai satu output dengan realisasi sebesar Rp. 52.397.887.000,- dengan persentase capaian kinerja 94,62%.

- c. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional.

Alokasi anggaran sasaran strategis dengan Indikator Kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional.” sebesar Rp. 28.521.614.000,- (du puluh delapan milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang untuk membiayai satu output dengan realisasi sebesar Rp. 23.922.554.300,- dengan persentase capaian kinerja 83,88%.

- d. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional

Alokasi anggaran sasaran strategis IV “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional” sebesar Rp. 9.825.460.000,- (sembilan milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang untuk membiayai satu output dengan realisasi sebesar Rp.8.723.885.000,- dengan persentase capaian kinerja 88,79%.

- e. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional

Alokasi anggaran sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional” sebesar Rp. 80.689.957.000,- (delapan puluh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk membiayai satu output dengan realisasi sebesar Rp. 75.739.131.800 dengan persentase capaian kinerja 93,86%.

- f. Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan

Alokasi anggaran sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan” sebesar Rp. 12.469.900.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membiayai satu output, dengan realisasi sebesar Rp. 11.972.634.000 dengan persentase capaian kinerja 96,01%.

- g. Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota

Alokasi anggaran sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota” sebesar Rp.23.158.832.000,- (dua puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk melaksanakan satu output, dan dengan realisasi sebesar Rp. 17.182.966.000 dengan persentase capaian kinerja 74,20%.

- h. Jumlah lembaga PNF memperoleh bantuan penguatan kelembagaan

Alokasi anggaran sasaran strategis indikator kinerja “Jumlah lembaga PNF memperoleh bantuan penguatan kelembagaan” sebesar Rp. 34.205.230.000,- (tigapuluh empat milyar dua ratus lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan satu output dengan realisasi sebesar Rp. 34.199.000.000, dengan persentase capaian kinerja 99,98%.

- i. Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat.
Alokasi anggaran sasaran strategis indikator kinerja “Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat.” sebesar Rp. 8.152.595,- (delapan milyar seratus lima dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk melaksanakan satu output dengan realisasi sebesar Rp. 6.231.718.000, dengan persentase capaian kinerja 76.44%.
- j. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran
Alokasi anggaran sasaran strategis indikator kinerja “Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran.” sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk melaksanakan satu output dengan realisasi sebesar Rp. 567.392.420, dengan persentase capaian kinerja 98.68%.
- k. Kendaraan operasional kantor
Alokasi anggaran sasaran strategis indikator kinerja “Kendaraan operasional kantor.” sebesar Rp. 619.273.000,- (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk melaksanakan satu output dengan realisasi sebesar Rp. 561.938.117, dengan persentase capaian kinerja 90.74%.
- l. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana
Alokasi anggaran sasaran strategis indikator kinerja “Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana” sebesar Rp. 3.816.970.000,- (tiga milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan satu output dengan realisasi sebesar Rp. 2.454.239.000, dengan persentase capaian kinerja 64.30%.
- m. Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN
Alokasi anggaran sasaran strategis indikator kinerja “Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN” sebesar Rp. 5.127.440.000,- (lima milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus

empat puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan satu output dengan realisasi sebesar Rp. 4.539.304.791, dengan persentase capaian kinerja 88,53%.

n. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi

Alokasi anggaran sasaran strategis indikator kinerja “Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi” sebesar Rp. 2.205.085.000,- (dua milyar dua ratus lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) untuk melaksanakan satu output dengan realisasi sebesar Rp. 2.176.085.000, dengan persentase capaian kinerja 98,68%.

2. Anggaran Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Capaian kinerja Direktorat Bindikastara dapat diukur dengan penyerapan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan layanan penyediaan pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Anggaran penyediaan pelayanan pendidikan masyarakat tahun 2015 yang di alokasikan pada Satuan Kerja Direktorat Bindikastara sebesar Rp 386.559.940.000,- (tiga ratus delapan puluh enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),

Alokasi anggaran tersebut dikelompokkan kedalam 4 jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Dengan membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran dengan realisasinya dapat untuk mengukur kinerja Direktorat Bindiktara, seperti nampak pada Tabel 19 di bawah ini.

Tabel 19
Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara Tahun 2015

Jenis Belanja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Alokasi Anggaran (000,-)	Realisasi		Alokasi Anggaran (000,-)	Realisasi	
		Nominal	%		Nominal	%
B. Pegawai	4.310.516	4.164.746	96,62	4.559.056	4.352.721	95,47
B. Barang	82.195.665	68.359.823	83,17	177.870.134	151.773.521	85,33
B. Modal	1.687.970	1.438.747	85,24	1.250.000	1.198.852	95,91
B. Sosial	179.508.800	179.224.800	99,84	202.880.750	202.880.750	100
Jumlah	268.446.958	253.188.116	94,32	386.559.940	360.205.844	93,18

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015, yaitu: 1 Januari - 31 Desember 2015. secara umum penggunaan anggaran telah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Daya serap anggaran untuk mewujudkan target capaian kinerja penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sebesar Rp. 360.205.843.699,- (tiga enam puluh milyar dua ratus lima juta delapan ratus empat puluh tiga Ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 386.559.940.000,- dengan persentase capaian kinerja 93,18%.

Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%. Hal ini terjadi karena realisasi untuk seluruh jenis belanja (kecuali belanja bantuan sosial) tidak mencapai 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, meliputi gaji pegawai dan uang makan. Sebagai akibat dari frekuensi pelaksanaan kegiatan yang tinggi di Direktorat Bindiktara maka uang makan pegawai tidak terserap 100%.
- b. Belanja Barang, adanya efisiensi perjalanan dinas, akomodasi, konsumsi dalam pelaksanaan kegiatan yang mengundang mitra dari daerah, dikarenakan: (1) biaya/harga perjalanan maupun akomodasi dibayarkan berdasarkan *ad cost* dan pada kenyataannya yang dibayarkan tersebut masih di bawah pagu dan/atau (2) tidak seluruh peserta yang diundang hadir

mengikuti kegiatan, ada beberapa peserta yang tidak hadir dengan berbagai alasan.

- c. Belanja Modal, adanya efisiensi pada harga barang di bawah pagu anggaran.

3. Anggaran Yang Tidak Dikontrakkinerjakan

Kalau dilihat alokasi anggaran penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan dann kesetaraan tahun 2015 sebesar **Rp. 386.559.940.000,-** sedangkan yang dikontrakkinerjakan antara Direktur Jenderal Paud dan Dikmas – Direktur Bindiktara sebesar **Rp. 342.148.677.000,-** .Artinya terdapat anggaran sebesar **Rp. 44,326,446,000,-** yang tidak dikontrakkinerjakan, yaitu:

Belanja Pegawai	Rp. 4.559.056,000,-
Belanja Barang (sebagian)	Rp. 38.517.390.000,-
Belanja Modal	Rp. 1.250.000,000,-



BAB 4

PENUTUP

Akuntabilitas kinerja menunjukkan ketercapaian yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penetapan kinerja tahunan. Akuntabilitas kinerja ini akan menggambarkan kinerja secara keseluruhan Direktorat Bindiktara Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas yang telah dapat direalisasikan oleh keempat subdirektorat yang ada. Untuk dapat mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Bindiktara dapat diukur dengan IKK yang telah ditetapkan. Namun perlu diketahui bahwa pencapaian kinerja ini: (1) sangat tergantung pada terlaksananya jadwal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, (2) kebijakan pelaksanaan anggaran, dan (3) IKK yang ditetapkan untuk 1 tahun anggaran.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dit. Bindiktara adalah belum menunjukan hasil yang baik, sehingga dapat dikatakan capaian kinerja Dit. Bindiktara belum sesuai dengan target yang diharapkan. Memang dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala yang sangat mengganggu, yaitu restrukturisasi yang berkepanjangan, adanya himbauan menteri keuangan pemberian bantuan kepada masyarakat/lembaga agar menggunakan belanja barang, dan pergantian pimpinan, serta pentaan pegawai di lingkungan Direktorat.

Demikian LAKIP Tahun 2015 Direktorat Bindiktara ini disusun, selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencapai target kinerja Direktorat Bindiktara tahun 2015. Diharapkan dari LAKIP Tahun 2015 ini dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja subdirektorat-subdirektorat di lingkungan Direktorat Bindiktara untuk mencapai target IKK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019.



Perjanjian Kinerja Tahun 2015

**Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
5. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan; dan
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

TARGET CAPAIAN**Kegiatan Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	ANGGARAN
Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	150.525 orang	76.404.076.000
	2. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A	95.200 orang	55.376.628.000
	3. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	11.575 orang	17.678.930.000
	4. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa paket B yang menerima bantuan operasional	5.000 orang	13.653.000.000
	5. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional	35.070 orang	78.730.139.000
	6. Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	10.000 orang	12.469.900.000
	7. Jumlah PKBM pembina dan SKB yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota	260 lembaga	41.007.445.000
	8. Jumlah lembaga PNF memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	445 lembaga	26.700.000.000
	9. Jumlah dokumen NSPK pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;	62	8.152.595.000
	10. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	39 unit	575.000.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	ANGGARAN
	11. Kendaraan operasional perkantoran	18 unit	410.220.000
	12. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	6 dokumen	3.816.970.000
	13. Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	20 dokumen	5.123.840.000
	14. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi	1 dokumen	2.049.934.000

Total Jumlah anggaran kegiatan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan Rp 342.148.677.000,-

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2015 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan



EVALUASI

unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal PAUD
dan Pendidikan Masyarakat

Harris Iskandar

Harris Iskandar

Jakarta, Agustus 2015
Direktur Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan



Erman Syamsuddin
Erman Syamsuddin